Buku Saku

PMKRI St. Thomas Aquinas

PP PMKRI
Margasiswa 1 Jl. Dr. Sam Ratulangie No. 1
Menteng-Jakarta Pusat-10350

http://pmkri.org/ #Kita_Indonesia @PMKRI.center

BUKU SAKU

PMKRI SANCTUS THOMAS AQUINAS

SUMPAH ANGGOTA
PERHIMPUNAN MAHASISWA KATOLIK
REPUBLIK INDONESIA

Kami berjanji,
bahwa kami, dalam kedudukan kami sebagai anggota
Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia,
secara langsung atau tidak langsung,
dan dalam keadaan bagaimanapun,
bertanggung jawab sepenuhnya akan kehidupan,
perkembangan, dan kejayaan
Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia.
Bahwa kami akan menjunjung tinggi, nama
Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia,
dalam pergaulan kami di dalam masyarakat umumnya,
dan kalangan mahasiswa khususnya.
Bahwa kami dalam menunaikan tugas sebagai anggota,
akan tunduk dan taat kepada
Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan-peraturan
Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia lainnya
yang sah.
Kami berjanji,
akan mempergunakan keanggotaan kami sebaik-baiknya,
demi kepentingan Gereja dan Negara Republik Indonesia.

Margasiswa 1
Jl. Dr. Sam Ratulangie No. 1 Menteng – Jakarta Pusat – Jakarta - 10350

SEJARAH PMKRI

Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) pada awalnya merupakan hasil fusi Federasi KSV (Katholieke Studenten Vereniging) dan *Perserikatan* Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Yogyakarta. Federasi KSV yang ada saat itu meliputi KSV St. Bellarminus Batavia (berdiri di Jakarta, 10 November 1928), KSV St. Thomas Aquinas Bandung (berdiri 14 Desember 1947), dan KSV St. Lucas Surabaya (berdiri 12 Desember 1948). Federasi KSV yang berdiri tahun 1949 tersebut diketuai oleh Gan Keng Soei (KS Gani) dan Ouw Jong Peng Koen (PK Ojong). Adapun PMKRI Yogyakarta yang pertama kali diketuai oleh St. Munadjat Danusaputro, didirikan pada tanggal 25 Mei 1947.

Keinginan Federasi KSV untuk berfusi dengan Perserikatan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Yogyakarta saat itu, karena pada pertemuan antar KSV di penghujung 1949, dihasilkan keputusan bersama bahwa "….kita bukan hanya mahasiswa Katolik, tetapi juga mahasiswa Katolik Indonesia ..." Federasi akhirnya mengutus Gan Keng Soei dan Ouw Jong Peng Koen untuk mengadakan pertemuan dengan moderator dan pimpinan PMKRI Yogyakarta.

Setelah mendapat saran dan berkat dari Vikaris Apostolik Batavia yang pro Indonesia, yaitu Mgr. PJ Willekens, SJ. Utusan Federasi KSV (kecuali Ouw Jong Peng Koen yang batal hadir karena sakit) bertemu dengan moderator pada tanggal 18 Oktober 1950 dan pertemuan dengan Ketua PMKRI Yogyakarta saat itu yaitu PK Haryasudirja bersama stafnya berlangsung sehari kemudian. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut intinya wakil federasi KSV yaitu Gan Keng Soei mengajak dan membahas keinginan "Mengapa kita tidak berhimpuan saja dalam satu wadah organisasi nasional

Margasiswa 1
Jl. Dr. Sam Ratulangie No. 1 Menteng – Jakarta Pusat – Jakarta - 10350

mahasiswa Katolik Indonesia? Toh selain sebagai mahasiswa Katolik, kita semua adalah mahasiswa Katolik Indonesia."

Maksud Federasi KSV ini mendapat tanggapan positif moderator dan pimpinan PMKRI Yogyakarta. Dan dua keputusan lain yang dihasilkan adalah:

1. Setelah pertemuan tersebut, masing-masing organisasi harus mengadakan kongres untuk membahas rencana fusi.
2. Kongres Gabungan antara Federasi KSV dan PMKRI Yogyakarta akan berlangsung di Yogyakarta tanggal 9 Juni 1951.

Dalam kongres gabungan tanggal 9 Juni 1951, Kongres dibuka secara resmi oleh PK Haryasudirja selaku wakil PMKRI Yogyakarta bersama Gan Keng Soei yang mewakili Federasi KSV. Di luar dugaan, Kongres yang semula direncanakan berlangsung hanya sehari, ternyata berjalan alot terutama dalam pembahasan satu topik, yakni penetapan tanggal berdirinya PMKRI.

Di saat belum menemui kesepakatan, Kongres Gabungan sempat diskors untuk memberikan kesempatan kepada masing-masing organisasi untuk kembali mengadakan kongres secara terpisah pada tanggal 10 Juni 1951. Akhirnya Kongres Gabungan untuk fusi-pun kembali digelar pada tanggal 11 Juni 1950 dan berhasil menghasilkan 14 keputusan yaitu:

1. Federasi KSV dan PMKRI Yogyakarta berfusi menjadi satu sebagai organisasi nasional mahasiswa katolik bernama: "Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia" yang kemudian disingkat PMKRI. Sebutan perhimpunan ini disepakati sebagai pertimbangan agar organisasi baru ini sudah bersiap-siap untuk mau dan mampu

menampung masuk dan menyatunya organisasi-organisasi mahasiswa Katolik lain yang telah berdiri berlandaskan asas dan landasan lain, seperti KSV-KSV di daerah-daerah pendudukan Belanda guna menuju persatuan dan kesatuan Indonesia.

2. Dasar pedoman (AD/Anggaran Dasar) PMKRI Yogyakarta diterima sebagai AD sementara PMKRI hingga ditetapkannya AD PMKRI yang definitif.
3. PMKRI didirikan di Yogyakarta pada tanggal 25 Mei 1947.
4. PMKRI berkedudukan di tempat kedudukan Pengurus Pusat PMKRI.
5. Empat cabang pertama PMKRI adalah: PMKRI Cabang Yogyakarta, PMKRI Cabang Bandung, PMKRI Cabang Jakarta, dan PMKRI Cabang Surabaya.
6. Dalam ART setiap cabang PMKRI harus dicantumkan kalimat, "PMKRI berasal dari Federasi KSV dan PMKRI Yogyakarta yang berfusi tanggal 11 Juni 1951".
7. Santo pelindung PMKRI adalah Sanctus Thomas Aquinas.
8. Semboyan PMKRI adalah "Religio Omnium Scientiarum Anima" yang artinya Agama adalah jiwa segala ilmu pengetahuan.
9. Baret PMKRI berwarna merah ungu (marun) dengan bol kuning di atasnya.
10. Kongres fusi ini selanjutnya disebut sebagai Kongres I PMKRI.
11. Kongres II PMKRI akan dilangsungkan di Surabaya, paling lambat sebelum akhir Desember 1952 dan PMKRI Cabang Surabaya sebagai tuan rumahnya.
12. Masa kepengurusan PMKRI adalah satu tahun, dengan catatan: untuk periode 1951-1952 berlangsung hingga diselenggarakannya Kongres II PMKRI.
13. PP PMKRI terpilih segera mendirikan cabang-cabang baru PMKRI di seluruh Indonesia dan mengenai hal ini perlu dikoordinasikan dengan pimpinan Waligereja Indonesia.

Margasiswa 1
Jl. Dr. Sam Ratulangie No. 1 Menteng – Jakarta Pusat – Jakarta - 10350

14. PK Haryasudirja secara aklamasi ditetapkan sebagai Ketua Umum PP PMKRI periode 1951-1952.

Dengan keputusan itu maka kelahiran PMKRI yang ditetapkan pada tanggal 25 Mei 1947 menjadi acuan tempat PMKRI berdiri. PMKRI didirikan di Balai Pertemuan Gereja Katolik Kotabaru Yogyakarta di jalan Margokridonggo (saat ini Jln. Abubakar Ali). Balai pertemuan tersebut sekarang bernama Gedung Widya Mandala.

Penentuan tanggal 25 Mei 1947 yang bertepatan sebagai hari Pantekosta, sebagai hari lahirnya PMKRI, tidak bisa dilepaskan dari jasa Mgr. Soegijapranata. Atas saran beliaulah tanggal itu dipilih dan akhirnya disepakati para pendiri PMKRI, setelah sejak Desember 1946 proses penentuan tanggal kelahiran belum menemui hasil. Alasan beliau menetapkan tanggal tersebut adalah sebagai simbol turunnya roh ketiga dari Tri Tunggal Maha Kudus yaitu Roh Kudus kepada para mahasiswa katolik untuk berkumpul dan berjuang dengan landasan ajaran agama Katolik, membela, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia.

KEANGGOTAAN PMKRI

Semua mahasiswa yang berkewarganegaran Republik Indonesia berhak menjadi anggota PMKRI. PMKRI bersifat inklusif/terbuka bagi semua mahasiswa, tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan mana pun. Asalkan bersedia menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Kekatolikan.

Berdasarkan Anggaran Dasar PMKRI pasal 7, masa keanggotaan PMKRI adalah 11 tahun terhitung sejak pertama kali menjadi mahasiswa.

Dalam pasal yang sama disebutkan bahwa anggota PMKRI terdiri dari:

a. Anggota biasa, ialah mahasiswa S0 dan S1 warga negara Indonesia yang masih aktif kuliah atau seperti yang diatur dalam Rapat Umum Anggota Cabang dengan batasan waktu paling lama 11 tahun sejak pertama kali sebagai mahasiswa.
b. Anggota Kehormatan, ialah mereka yang berjasa dalam PMKRI menurut ketetapan MPA.
c. Anggota Penyatu, ialah mereka yang pernah menjadi anggota PMKRI yang berhak penuh.
d. Anggota Penyokong, ialah mereka yang memberi sokongan tetap berupa uang atau hak.

Dalam konteks pembinaan, di beberapa cabang, jenis keanggotaan ditambah dengan satu macam, yaitu Anggota Muda. Anggota Muda yaitu anggota yang telah lulus dari Masa Penerimaan Anggota Baru (MPAB). Sehingga mereka baru disebut menjadi anggota biasa setelah lulus Masa Bimbingan (MABIM). Alasan penambahan jenis keanggotaan ini lebih bersifat preventif dan selektif. Preventif dalam arti mencegah orang-orang yang baru masuk sebagai anggota,

yang berkehendak tidak baik "mengubah suasana" kondusif PMKRI demi sebuah kepentingan tertentu. Selektif dalam arti akan memberikan sebuah seleksi tersendiri mengenai kesungguhan anggota muda untuk berjuang dan membina diri di PMKRI. Selain itu anggota muda dalam RUA hanya memiliki hak bicara. Jadi berbeda dengan anggota biasa yang memiliki hak bicara dan hak suara.

Anggota penyatu adalah istilah pengganti dari alumni. Istilah baru ini dipandang lebih mengikat ke dalam daripada PMKRI. Lebih menuntut komitmen perhatian para mantan anggota biasa untuk terus memberikan kontribusi positif bagi adik-adiknya.

KEANGGOTAAN DAN FUNGSIONARIS RANGKAP

Berdasarkan Ketetatan MPA Nomor: 13/TAP/MPA/12/1998 (Banjarmasin)
Hal ini penting untuk menjadi pamahaman bersama dan penting untuk diketahui oleh semua anggota PMKRI, dalam banyak hal ada kasus yang bisa saja terjadi karena tidak adanya pemahaman tentang bagaimana status keangotaan PMKRI.

Berikut beberapa ketentuan khusus tentang status keanggotaan yang diatur dalam ketentuan formal yuridis PMKRI:

1. Untuk organisasi kemasyarakatan dengan kategori kesamaan kegiatan misalnya: olah raga, minat, rekreasi, perangkapan anggota dan perangkapan fungsionaris diperbolehkan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anggota dan fungsionaris

dalam bidang-bidang kegiatan. Contoh: anggota PMKRI diperkenankan menjadi anggota Solidaritas Perempuan dan Kelompok Studi Gender.

2. Untuk organisasi kemsayarakatan dengan kategori kesamaan profesi, perangkapan anggota dan fungsionaris diperbolehkan, dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anggota dan fungsionaris dalam bidang profesi. Contoh: Menjadi anggota atau fungsionaris KMK (Keluarga Mahasiswa Katolik) sekaligus anggota dan fungsionaris PMKRI diperbolehkan.
3. Untuk organisasi kemasyarakatan dengan kesamaan agama:

   AGAMA KATOLIK

   Perangkapan anggota diperbolehkan dalam rangka meningkatkan pendalaman dan iman kekatolikan. Perangkapan pengurus tidak diperbolehkan/tidak diperbolehkan agar pengurus senantiasa memberikan perhatian lebih serius dalam menjaga kelangsungan dan kesinambungan pembinaan, perjuangan, serta konsistensi pembinaan. Contoh: Menjadi fungsionaris PMKRI sekaligus anggota Pemuda Katolik tidak diperbolehkan.

   AGAMA NON KATOLIK

   Perangkapan anggota dan fungsionaris tidak diperbolehkan demi terjaminnya independensi serta konsistensi pembinaan. Contoh: Menjadi anggota HMI/PMII/ GMKI sekaligus PMKRI tidak diperbolehkan.
4. Untuk organisasi kemasyarakatan dengan kategori keanggotaan otomatis, perangkapan anggota diperbolehkan. Sedangkan perangkapan fungsionaris tidak diperbolehkan demi terjaminnya independensi perhimpunan. Contoh: Menjadi anggota FKPPI (Forum Komunikasi Putra Putri ABRI) diperbolehkan namun untuk perangkapan fungsionaris tidak diperbolehkan.

5. Untuk organisasi kemasyarakatan dengan kategori kesamaan status, fungsi, dan peran, perangkapan anggota dan perangkapan fungsionaris tidak diperbolehkan demi terjaminnya independensi perhimpunan. Contoh: Tidak diperbolehkan anggota PMKRI merangkap menjadi anggota dan fungsionaris PMII/GMNI/HMI dsb.
6. Untuk organisasi politik, perangkapan fungsionaris tidak diperbolehkan demi terjaminnya independensi perhimpunan. Contoh: Anggota PMKRI tidak diperbolehkan menjadi fungsionaris PDI, PKP dsb.
7. Untuk organisasi sosial politik. Selama masih menjabat sebagai fungsionaris, baik ditingkat cabang maupun pusat, perangkapan anggota tidak diperbolehkan. Contoh: Selama menjadi pengurus PMKRI di cabang maupun Pusat maka sebagai anggota, tidak diperkenankan menjadi anggota organisasi sosial politik atau partai tertentu. Dengan demikian otomatis tidak diperkenankan menjadi fungsionaris pula.

ORIENTASI GERAK PMKRI

VISI PMKRI

Visi PMKRI: Terwujudnya keadilan sosial, kemanusiaan, dan persaudaraan sejati.

MISI PMKRI

Berjuang dengan terlibat dan berpihak pada kaum tertindas melalui kaderisasi intelektual populis yang dijiwai nilai-nilai kekatolikan untuk mewujudkan keadilan sosial, kemanusiaan, dan persaudaraan sejati.

USAHA-USAHA

Untuk mencapai visi dan misi tersebut PMKRI akan berusaha di lapangan:

1. Kerohanian - Mental
2. Kemasyarakatan - Kenegaraan
3. Kemahasiswaan

ASAS

PMKRI dalam seluruh orientasi dan kegiatannya *berasaskan* Pancasila, *dijiwai* Kekhatolikan, *disemangati* oleh Kemahasiswaan (AD: pasal 2, 3, 4)

IDENTITAS KADER

Pada dasarnya pembinaan di PMKRI ditujukan untuk membantu membentuk para anggota PMKRI dalam mencapai keunggulan pribadi dengan integritas pribadi yang utuh. Integritas pribadi yang utuh, yang hendak dicapai dapat dicirikan oleh:

1. *SENSUS CHATOLICUS*
   Rasa Kekatolikan.
2. SEMANGAT *MAN FOR OTHERS*
   Panggilan hidup misioner yang menuntut sikap siap sedia. Bahwa setiap kegiatan hidup tidak hanya didasarkan pada kepentingan diri sendiri melainkan sejauh mungkin diabdikan pada kepentingan sesama yang lebih besar.
3. *SENSUS HOMINIS*
   Rasa kemanusiaan, terdapat kepekaan terhadap segala unsur manusiawi yang meliputi solidaritas pada setiap pribadi manusia.
4. PRIBADI YANG MENJADI TELADAN
   Kemampuan untuk menjadi pribadi yang menjadi garam dan terang dunia, dalam pola pikir, sikap, dan tingkah laku.

5. UNIVERSALITAS
   Sikap siap sedia untuk memasuki celah-celah dan dimensi kehidupan masyarakat yang paling membutuhkan dan menerobos tembok-tembok diskriminasi dalam bentuk apapun.

6. *MAGIS SEMPER*
   Semangat lebih dari sebelumnya yang hanya dapat dicapai dengan kerja keras, mutu, magis, dan profesional. Pribadi demikian selalu mengacu pada *on going formation*.

Keenam ciri ini menjadi pembeda karakter seoarng kader PMKRI dengan yang lainnya. Keenam hal ini adalah terjemahan dari tiga benang merah PMKRI yang menjadi identitas PMKRI.

ATRIBUT PMKRI

1. BARET MERAH BOL KUNING
   - Jenis topi yang digunakan PMKRI adalah baret bukan peci atau topi pet. Baret yang juga dipakai para tentara ini, selain melambangkan kewibawaan, juga mengandung makna anggota PMKRI ingin menjadi prajurit Gereja dan Tanah Air. Konon pemilihan baret merah ini dikarenakan pada jaman perang revolusi kemerdekaan, telah terkenal pasukan tentara Belanda Berbaret Merah yang sangat ditakuti oleh pejuang-pejuang kemerdekaan kita karena keberanian, kegagahan, dan kegigihannya dalam berperang. Karena ingin meniru semangat para tentara itulah maka dipilih baret merah.

- Warna merah (marun) melambangkan keberanian, tekad yang besar untuk membela gereja dan tanah Air.
- Bol, melambangkan bola dunia. Dunia yang penuh kejahatan dan penderitaan yang harus ditanggung, dipanggul, ditopang, dipangku, oleh segenap anggota PMKRI. Warna Kuning yang melambangkan gereja Katolik. Gereja yang harus menebus dosa manusia karena kejahatannya, dan mengentaskan penderitaan umat manusia.

Jadi makna keseluruhannya adalah anggota PMKRI diharapkan dapat menjadi prajurit Gereja dan Tanah Air. Yang berkewajiban memanggul dan menjaga Gereja dan Tanah Air dari dosa-dosa/kejahatan umat manusia serta melawan segala bentuk penindasan yang menimbulkan penderitaan bagi umat manusia.

Penggunaan : Acara resmi intern dan ekstern.
Cara pakai : Dipakai di kepala, miring ke kanan.
Pemakai : Anggota biasa, pengurus, tim pembina, depertim, pastor moderator.

Catatan:
Pada baret biasanya diberikan emblim. Emblim tersebut dapat bergambar lambang cabang atau lambang PMKRI secara nasional.

2. Jas Merah Marun

Jas mengandung makna kesetaraan di antara segenap anggota PMKRI. Dengan adanya keseragaman melalui jas, maka baik mereka yang menjabat sebagai Ketua maupun anggota kedudukannya setara. Mereka hanya dibedakan secara struktural tetapi secara substansial adalah sama. Selain kesetaraan, jas yang berwarna merah marun tersebut, melambangkan juga keperwiraan dari

pemakainya. Dengan demikian para anggota PMKRI diharapkan dapat bekerja seperti seorang perwira, yang selalu memimpin dan mengarahkan para pengikutnya berjalan pada visi yang benar serta mampu mengimplementasikan dan menggunakan asas kolektif dan kolegial (kesetaraan dan kebersamaan) dalam setiap aktivitasnya.

Penggunaan : Acara resmi intern dan ekstern.
Cara pakai : Seperti kemeja.
Pemakai : Anggota biasa, pengurus, tim pembina, depertim, pastor moderator.

3. GORDON

Maknanya adalah kebesaran. Bahwa orang yang mengenakan gordon adalah orang yang sedang memangku jabatan tertentu di PMKRI.

Catatan:

a. Pada Gordon PP PMKRI, Gordon menggunakan warna dasar merah marun dengan garis-garis warna kuning emas berjajar di tengahnya. Terdapat 3 garis kuning emas untuk Ketua Presidium PP PMKRI, sedangkan untuk staf yang lain hanya terdiri dari 2 garis kuning emas. Sebagai warna yang mencolok, warna kuning emas menandakan bahwa orang yang mengenakan gordon tersebut harus mampu menjadi panutan atau teladan bagi orang lain, karena pengguna gordon adalah sosok/figur yang akan selalu dilihat oleh orang lain, baik sikap, tindakan, maupun pikirannya.
b. Untuk gordon cabang, disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan cabang. Warna dibebaskan.
c. Pada ujung Gordon biasanya digantungkan medali, bisa berwujud medali lambang PMKRI secara

nasional, dapat pula berbentuk medali lambang PMKRI Cabang.

4. MEDALI
   Medali yang diletakkan di ujung gordon melambangkan kehormatan. Maknanya bahwa orang yang mendapat medali tersebut adalah orang yang mendapat kehormatan untuk memegang sebuah jabatan tertentu. Medali ini dapat terbuat dari perak, perunggu, aluminium, tembaga, dan emas. Bentuknya bebas.

5. BENDERA PMKRI (NASIONAL/CABANG)
   Bendera mengandung makna kejayaan. Bentuknya empat persegi panjang.
   Menurut ketetapan MPA No. 19/TAP/MPA-XVIII/1992 ukuran bendera adalah 80 x 120 cm2.
   Bendera PMKRI selalu diletakkan di sebelah kanan bendera Merah Putih.

6. EMBLIM (CABANG/NASIONAL)
   Melambangkan kekhasan dan kebanggaan. Emblim biasanya diletakkan di baret sebelah kiri atau di dada sebelah kiri.

7. LOGO NASIONAL
   a. TULISAN PMKRI
      Simbol : singkatan nama organisasi.
      Warna : putih
      Arti warna : kesucian
      Makna : Perjuangan dan Pembinaan PMKRI utuk menebus Ampera merupakan perjuangan yang luhur, suci, dan mulia.

Margasiswa 1
Jl. Dr. Sam Ratulangie No. 1 Menteng – Jakarta Pusat – Jakarta - 10350

b. LINGKARAN
   Simbol : dunia
   Warna : merah
   Arti warna : keberanian
   Makna : PMKRI hidup didunia yang penuh dengan tantangan, dan masalah yang harus dihadapi dengan keberanian guna mewujudkan tujuan perhimpunan.

b. API OBOR
   Simbol : terang dan semangat
   Warna : kuning
   Arti warna : kekhatolikan
   Makna : PMKRI hendaknya dapat menjadi jalan terang ditengah kegelapan/kebatilan dunia dan untuk mewujudkannya diperlukan semangat yang menyala-nyala yang merupakan bentuk penghayatan spiritualitas kekhatolikan.

c. LIMA LIDAH API
   Simbol : Pancasila
   Warna : kuning
   Arti warna : keadilan dan kemakmuran
   Makna : Pancasila sebagai dasar negara menjadi acuan PMKRI dalam hidup berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kemakmuran.

d. BUKU
   Simbol : Intelektualitas
   Warna : putih
   Arti warna : kebenaran
   Makna : Dalam berkarya PMKRI harus menjunjung tinggi dan mendasarkan intelektualitas dalam mewujudkan kebenaran di tengah-tengah dinamika kemasyarakatan.

e. SALIB

Margasiswa 1
Jl. Dr. Sam Ratulangie No. 1 Menteng – Jakarta Pusat – Jakarta - 10350

Simbol : pengorbanan
Warna : putih
Arti warna : ketulusan
Makna : Berkarya dalam pengabdian di PMKRI membutuhkan pengorbanan yang besar dan membutuhkan ketulusan hati atas pengorbanan tersebut.

f. DUA TANGKAI TUJUH BELAS KUNTUM PADI
Simbol : Proklamasi 17 Agustus 1945
Warna : kuning
Arti warna : semangat
Makna : PMKRI harus turut berperan aktif dalam mewujudkan semangat dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

PENATAAN ATRIBUT

Menurut ketetapan MPA No. 19/TAP/MPA-XVIII/1992:

1. Setiap anggota PMKRI diwajibkan memiliki baret berwarna merah dengan bol kuning di atasnya, yang dilengkapi emblim pusat atau cabang.
2. Warna baret yang dimaksud di atas ada pengecualian untuk PMKRI Cabang Bandung yang berwarna hitam.
3. Atribut DPC adalah gordon yang berwarna dan disainnya ditentukan sendiri oleh cabang yang bersangkutan.
4. Dalam kegiatan intern dan ekstern yang resmi atau penting setiap anggota DPC/PP diwajibkan memakai atribut yang telah ditentukan.
5. Menyangkut pengadaan jaket, diserahkan kepada masing-masing cabang.
6. Ukuran bendera untuk cabang dan nasional 80 x 120 cm.

INDEPENDENSI DAN INTERDEPENDENSI PMKRI

Bahwa secara konstitusional, PMKRI mempunyai otonomi dalam mengurus rumah tangganya sendiri. PMKRI tidak terikat atau mengikatkan diri pada organisasi kemasyarakatan, organisasi politik tertentu bahkan dalam Hirarki Gereja.

Sikap independensi perhimpunan diartikan sebagai mandiri, tidak terikat, atau mengikatkan diri dengan ormas, orpol, dan Hirarki Gereja, dan tanpa campur tangan dari pihak luar. Namun tetap aktif berinteraksi dengan lingkungan kemasyarakatannya dalam rangka mewujudkan cita-cita perhimpunan. Keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari berbagai unsur dalam masyarakat, karena keberadaan itu sendiri merupakan bagian integral dari masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini PMKRI bukan juga adalah *underbow* partai politik tertentu.

Contoh: Kader PMKRI yang masih bersatus anggota biasa yang berhak penuh terlibat dalam agenda dan atau aktivitas politik partai politik tertentu dengan sendirnya adalah pelanggaran serius terhadap status keanggotaanya. Bahwa dalam kapaisitasnya sebagai individu yang merdeka terdapat status keanggotaan PMKRI yang tidak membatasi kebebasaannya untuk terlibat aktif dalam kegiatan politik partai.

Interdependensi merupakan sisi lain dari keberadaan organisasi ini, karena usaha ke arah pencapaian cita-cita perhimpunan juga dipengaruhi oleh lingkungan masyarakatnya, dalam berbagai bentuk hubungan dan keterlibatan gerakan kemasyarakatan PMKRI, seperti pendekatan program, dialog partisipatif, konsultatif, serta

bentuk-bentuk lain sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi perhimpunan.

Independensi PMKRI bukan berarti netralitas atau eksklusifisme melainkan merupakan perwujudan secara optimal komitmen PMKRI untuk menyumbangkan darma baktinya menebus Amanat Penderitaan Rakyat demi tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

SEMBOYAN PMKRI

Semboyan Spiritual
Religio Omnium Scientiarum Anima (ROSA) artinya Agama adalah jiwa segala ilmu pengetahuan.

Semboyan Misioner
Pro Ecclesia et Patria artinya Untuk Gereja dan Tanah Air.

SANCTUS PELINDUNG NASIONAL PMKRI

SANCTUS THOMAS AQUINAS

Thomas lahir di Aquino, dekat Monte Cassino, Italia, pada tahun 1225. Keluarganya adalah keluarga bangsawan yang kaya raya. Ayahnya, Pangeran Landulph berasal dari Aquino, sedang ibunya, Theodora adalah putri bangsawan dari Teano.

Ketika berusia 5 tahun, Thomas dikirim belajar pada para rahib Benediktin di Biara Monte Cassino. Di sana Thomas memperlihatkan kepandaian yang luar biasa. Ia *rajin belajar dan tekun berefleksi* serta *tertarik pada segala sesuatu tentang*

Tuhan. Karena kecerdasannya, oleh Abbas Monte Cassino ia dikirim belajar di Universitas Napoli.

Di universitas tersebut, Thomas berkembang pesat dalam pelajaran filsafat, logika, tata bahasa, retorika, musik, dan matematika. Ia bahkan jauh lebih pintar daripada para gurunya. Akhirnya, Thomas hidup membiara pada Ordo Dominikan. Sebuah ordo yang bertempat dekat dengan ia belajar. VERITAS (Kebenaran) yang menjadi motto para biarawan Dominikan sangat menarik hati Thomas.

Keluarganya berusaha menghalang-halanginya agar tidak menjadi biarawan Dominikan. Mereka lebih suka kalau Thomas menjadi biarawan Benediktin. Bahkan ia dipengaruhi keluarganya, kalau akan diberikan kedudukan sebagai Abbas di Monte Cassino. Thomas menolaknya dan untuk menghindari campur tangan keluarganya ia pergi Ke Paris untuk melanjutkan studi. Tetapi dalam perjalanan, ia ditangkap kakaknya dan dipenjarakan di Rocca Secca selama dua tahun. Selama di penjara, keluarganya menggunakan segala cara untuk mempengaruhi dan melemahkan ketetapan hatinya. Dan hati Thomas bergeming menghadapi perlakuan tersebut.

Di dalam penjara itu, Thomas menceritakan rahasianya kepada seorang sahabatnya, bahwa ia telah mendapat rahmat istimewa. Ia telah berdoa dan memohon kemurniaan budi dan raga pada Tuhan. Dan Tuhan mengabulkan permohonannya dengan mengutus dua orang malaikat untuk meneguhkan dia dan membantunya agar tidak mengalami cobaan-cobaan kotor dan berat.

Selam berada di penjara, Thomas diijinkan membaca buku-buku rohani dan terus mengenakan jubah Ordo Dominikan.

Akhirnya keluarganya harus bersedia menerima kenyataan bahwa Thomas tidak bisa dipengaruhi. Mereka membebaskan Thomas dan membiarkannya meneruskan panggilannya sebagai seorang biarawan Dominikan.

Setelah belajar di Paris, Thomas melanjutkan studinya di Cologna, Jerman di bawah bimbingan Sanctus Albertus Magnus, seorang imam Dominikan yang terkenal di masa itu.

Di Cologna, Thomas ditahbiskan menjadi imam pada tahun 1250. Dua tahun kemudian diangkat menjadi profesor di Universitas Paris dan tinggal di biara Dominikan Sanctus Yakobus. Ia mengajar kitab suci dan lain-lainnya di bawah bimbingan seorang profesor kawakan. Tak berapa lama, Thomas terkenal sebagai seorang pujangga yang tak ada bandingannya saat itu. Ia jauh melebihi Albertus Magnus pembimbingnya dalam pemikiran dan kebijaksanaan.

Tulisan-tulisannya menjadi harta Gereja dan dunia yang tak ternilai harganya hingga saat ini, seperti buku *Summa Theologia*. Taraf kemurnian hatinya tidak kalah dengan ketajaman akal budinya yang mengagumkan; kerendahan hatinya tak kalah dengan kecerdasan budi dan kebijaksanaannya. Oleh karena itu Thomas diberi gelar "*Doctor Angelicus*" atau Pujangga Malaikat.

Pada tahun 1264, ia ditugaskan oleh Sri Paus Urbanus IV (1261-1264) untuk menyusun teks liturgi Misa dan Ofisi pada Sakramen Maha Kudus. Lagu-lagu hymne (pujian) anatara lain "*Sacris Solemniis*" dan "*Lauda Sion*" menunjukkan keahliannya dalam Sastra Latin dan Ilmu Ketuhanan.

Dalam sebuah penampakan, Yesus yang tersalib mengatakan kepadanya "Thomas, engkau telah menulis sangat baik

tentang Diriku. Balasan apakah yang kau inginkan dari-Ku?" Thomas menjawab "Tidak lain hanyalah diri-Mu."

Dalam perjalanannya untuk menghadiri konsili di Lyon Perancis, Thomas meninggal dunia di Fousa Nuova, pada tahun 1274.

Sanctus Thomas Aquinas digelari Imam dan Pujangga Gereja. Gereja mengenangkan jasa-jasa Thomas Aquinas atau sering pula disebut Thomas Aquino setiap tanggal 28 Januari.

SPIRITUALITAS KADER PMKRI

SPIRITUALITAS

Spiritualitas adalah keterarahan batin dalam setiap sikap yang kita ambil. Istilah spiritualitas mengandung nada cita-cita yang menjiwai seluruh diri, seluruh cara bersikap, dan bertindak seseorang yang bukan berdasarkan nafsu, emosi, egoisme dan pamrih, melainkan berdasarkan sesuatu yang bersifat spiritual, rohani, luhur, yang mengatasi kita sendiri.
Kader adalah anggota perhimpunan dan atau kelompok terpilih yang mampu menopang dan melatih anggota dan atau kelompok yang lain untuk memperkuat eksistensi perhimpunan, memprjuangkan tercapainya tujuan perhimpunan dan terlaksananya program perhimpunan.

KADER

Kader adalah seseorang yang memiliki kedisiplinan dan dedikasi yang penuh serta mental perilaku yang baik. Seseorang yang memiliki kemampuan berpikir sistematis, realistis, dialektis, logis-rasional dan radikal di samping pengetahuan yang kokoh terhadap watak organisasi dan masa depan organisasi. Kader adalah seseorang yang berilmu

tinggi, memiliki kesadaran sosial-kemasyarakatan, yang jeli melihat dan menanggapi kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara. Ia pun harus berwawasan kebangsaan, meletakkan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara di atas segala kepentingan pribadi dan organisasi. Selain itu ia harus memiliki motivasi yang tinggi dan spiritualitas yang benar melihat Yang Ilahi dalam masalah duniawi secara konsekuen dan radikal dalam mengikuti Yesus Sang Pembebas bagi tegaknya Kerajaan Allah untuk mewujudkan tujuan penciptaan.
Dengan demikian, prinisp-prinsip berpikir seorang kader PMKRI adalah:
Berpikir Sistemastis,
Berpikir Realisitis,
Berkpikir Dialektis,
Logis-Rasional.

SPIRITUALITAS PEMBINAAN KADER
Spritualitas kader PMKRI diwujudkan dalam bentuk **TIGA BENANG MERAH**, yang meliputi *INTELEKTUALITAS, KRISTIANITAS,* dan *FRATERNITAS*. Ketiga unsur inilah yang seharusnya selalu mengarahkan dan menyemangati segenap kader PMKRI dalam segala pola aktivitasnya. Yang akhirnya menjadi *nilai pembeda, nilai lebih, nilai pengikat, dan nilai penguji* dalam tataran kompetisi dengan mahasiswa lain yang non PMKRI.

Nilai pembeda artinya tiga benang merah ini akan mencirikan bahwa seorang kader PMKRI mempunyai kekhasan karakter dibandingkan dengan mahasiswa lain. Apabila tiga benang merah ini telah terinternalisasi dan menjadi sebuah karakter, maka *nilai lebih* artinya bahwa spiritualitas kader PMKRI ini jika dihayati secara tepat akan memberikan semangat berkompetisi yang tinggi terhadap mahasiswa lain, sehingga

terdapat niat untuk lebih baik daripada yang lain. *Nilai pengikat* artinya kekhasan yang telah terinternalisasi pada akhirnya kan memunculkan kesadaran bahwa PMKRI telah menyumbangkan karakter yang membedakan dan memberikan kelebihan terhadap anggotanya sehingga kesadaran ini pada akhirnya akan menimbulkan ikatan batin dan rasa memiliki terhadap perhimpunan, dan pada akhirnya akan membawa nilai-nilai ini kepada masyarakat yang lain untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan Gereja dan Tanah Air.

Nilai penguji, ketiga unsur tersebut akan menjadi tolok ukur kematangan kader PMKRI dan komitmen para anggota terhadap pembinaan dan perjuangan PMKRI, sehingga akan tersaring para anggota yang ingin mewujudkan dan mempertahankan semangat Kristianitas-Fraternitas-Intelektualitas dalam menumbuhkembangkan integritas pribadi yang utuh, pada gerak langkah PMKRI dalam menebus Amanat Penderitaan Rakyat.

KRISTIANITAS

Makna Krintianitas adalah keberpihakan kepada kaum tertindas (*preferential option for the poor*) dengan Yesus sebagai teladan gerakan.

FRATERNITAS

Pengharagaan yang sama kepada sesama umat manusia sebagai wujud persaudaraan sejati dalam solidaritas kemanusiaan yang menembus sekat-sekat primordial.

INTELEKTUALITAS

Penguasaan ilmu pengetahuan harus diabdikan bagi kesejahteraan umat manusia (visi etis).

LEMBAGA KEKUASAAN PMKRI

	EKSEKUTIF	LEGISLATIF	YUDIKATIF
NASIONAL	PP	MPA	MPA
CABANG	DPCP	RUAC	RUAC

Keterangan:

PP = Pengurus usat

DPC = Dewan Pimpinan Cabang

MPA = Majelis Permusyawaratan Anggota

RUAC = Rapat Umum Anggota Cabang

PERATURAN PMKRI

YURIDIS KONSTITUSIONAL	Anggaran Dasar
	Anggaran Rumah Tangga Nasional
	Anggaran Rumah Tangga Cabang
YURIDIS OPERASIONAL	Ketetapan MPA
	Kesepakatan Rakernas
	Keputusan Pengurus Pusat
	Ketetapan RUAC
	Keputusan DPC
	Keputusan RUA Rayon
	Keputusan BP Rayon
KONVENSI	Ketentuan-ketentuan tak tertulis mengenai tata cara berorgansisasi yang telah menjadi kebiasaan di perhimpunan sepanjang tidak bertentangan dengan aturan formal yuridis dan operasional yang berlaku di perhimpunan. Konvensi atau kesepakatan ini biasanya juga disebut sebagai Yurisprudensi.

Margasiswa 1
Jl. Dr. Sam Ratulangie No. 1 Menteng – Jakarta Pusat – Jakarta - 10350

Catatan :

- Sedapat mungkin ketentuan Anggaran Rumah Tangga Cabang sesuai dengan ketentuan Anggaran dasar dan Angaran Rumah Tangga PMKRI. Ini penting dalam menjaga hirarki aturan (asas hukum *lex superior derogat legi inferior*).
- Dalam pembuatan Surat ketetapan baik itu MPA/RUA atau surat keputusan PP/DPC dan atau jabatan sturkutral lainya dalam lembaga kekuasaan eksekutif PMKRI semua ketentuan mulai dari AD/ART/ARTC/Tap MPA/TAP RUA yang berhubungan dengan hal maksud dikeluarkannya surat keputusan dan atau ketetapan tersebut harus dicantumkan dengan disertai nomor dan bunyi pasal dimaksud. Ini dimaksudkan demi memperjelas dasar hukum dikeluarkannya keputusan tersebut dan telah dipastikannya bahwa tidak ada ketentuan yuridis organsasi yang dilanggar.

JABATAN STRUKTURAL PMKRI

a. MANDATARIS MPA/FORMATUR/KETUA PRESIDIUM PP PMKRI
   Berada ditingkat pusat/nasional, dipilih melalui sidang MPA.
b. PRESIDIUM PENGURUS PUSAT
   Dalam tugas kesehariannya Ketua Presidium Pengurus Pusat dibantu oleh para pengurus harian, yang biasanya terdiri dari:
   a. PRESIDIUM PENGEMBANGAN ORGANISASI
   b. PRESIDIUM PENDIDIKAN DAN KADERISASI
   c. PRESIDIUM GERAKAN KEMASYARAKATAN
   d. PRESIDIUM HUBUNGAN ANTAR PERGURUAN TINGGI

Margasiswa 1
Jl. Dr. Sam Ratulangie No. 1 Menteng – Jakarta Pusat – Jakarta - 10350

e. PRESIDIUM HUBUNGAN LUAR NEGERI
f. PRESIDIUM HUBUNGAN MASYARAKAT KATOLIK
g. SEKRETARIS JENDERAL

Secara fungsional dan berdasarkan asas kerja kolektif kolegial (kesetaraan dan kebersamaan) kedudukan antar presidium di atas adalah sejajar. Presidium-presidium tersebut dipilih oleh Mandataris MPA/Formatur/Ketua Presidium dan bertanggung jawab kepadanya.

c. BIRO PENGURUS PUSAT

Jabatan biro merupakan jabatan di bawah struktur presidium. Biro bertanggung jawab kepadanya. Jenis-jenis biro, dibentuk berdasarkan kebutuhan. Biro dipilih oleh Mandataris MPA/Formatur/Ketua Presidium.

Komposisi di tingkat pusat ini sedapat mungkin diikuti oleh cabang-cabang (AD PMKRI pasal 11 ayat 3.b)

d. KOMISARIS DAERAH (KOMDA)

Berada di tingkat regional, dipilih oleh cabang-cabang yang menjadi wilayahnya dan disahkan oleh Mandataris MPA, berkedudukan di daerah tingkat I (satu) atau di mana dianggap perlu. Fungsi KOMDA adalah mengkoordinir cabang-cabang di wilayahnya, dan menyampaikan laporan kegiatan pada tiap cabang setiap 3 (tiga) bulan sekali.

e. KOMISARIS "EX-OFFICIO"

Hanya berlaku untuk PMKRI Cabang DKI Jakarta dan dijabat secara otomatis oleh Ketua Presidium PMKRI DKI Jakarta. Pemberlakuan ini dikarenakan kedudukan PP PMKRI di Ibukota Republik Indonesia (Jakarta). Komisaris Ex-officio artinya komisaris karena kedudukannya. Ketua Presidium PMKRI Cabang DKI Jakarta adalah anggota Pengurus Pusat dan kedudukannya sejajar dengan presidium yang lain sehingga memperoleh hak untuk menghadiri semua rapat PP PMKRI. Tujuan adanya komisaris ini adalah agar

seluruh anggota PMKRI Cabang DKI Jakarta secara langsung dapat mendukung operasional program Pengurus Pusat.

f. MANDATARIS RUA/FORMATUR/KETUA PRESIDIUM DPC, berkedudukan di cabang dan dipilih oleh Rapat Umum Anggota di cabang yang bersangkutan.
g. MANDATARIS RUA/FORMATUR/KETUA PRESIDIUM BADAN PENGURUS RAYON, berkedudukan di rayon dan dipilih oleh RUA di rayon yang bersangkutan.
h. PRESIDIUM, presidium yang ada di PMKRI atau mereka yang di cabang sering disebut dengan PHC (PENGURUS HARIAN CABANG) biasanya terdiri dari:
    h. PRESIDIUM PENGEMBANGAN ORGANISASI
    i. PRESIDIUM PENDIDIKAN DAN KADERISASI
    j. PRESIDIUM GERAKAN KEMASYARAKATAN
    k. PRESIDIUM HUBUNGAN ANTAR PERGURUAN TINGGI
    l. SEKRETARIS JENDERAL
i. BIRO CABANG

    Biro di tingkat cabang, secara struktural kedudukannya di bawah presidium sehingga tanggung jawabnya kepada presidium yang bersangkutan. Jenis-jenis biro ditentukan berdasarkan kebutuhan cabang. Biro diangkat oleh Ketua Presidium Cabang.

    Catatan:

    Pengurus PMKRI yang terdiri dari para presidium dan biro disebut juga dengan *Dewan Pimpinan Cabang*.
j. BADAN SEMI OTONOM (BSO)

    DPC di PMKRI merupakan sebuah supratruktur. Sedangkan BSO merupakan infrastrukturnya. BSO didirikan dengan tujuan untuk mendukung program-program DPC. Aktivitas tertentu yang tidak dapat dikerjakan oleh DPC, dapat dilaksanakan oleh BSO. Aktivitas tertentu tersebut dikerjakan oleh BSO dalam

rangka menambah profesionalisme kader. BSO didirikan berdasarkan kemampuan dan kebutuhan cabang. Misalnya PMKRI Cabang A, memiliki banyak kader yang berpotensi dan berbakat dalam bidang bisnis, maka didirikanlah jenis BSO Usaha. Meskipun DPC telah memiliki bendahara yang bertugas mencari dana. Tetapi dengan ada lembaga tersendiri yang secara khusus dan profesional menangani usaha tertentu di bidang bisnis, maka selain akan menguntungkan DPC (terbantu mencari dana) juga akan menambah keprofesionalan anggota dalam berwiraswasta. BSO dapat juga berfungsi sebagai lembaga mantel PMKRI. Terutama bagi kader-kader PMKRI yang telah usai menjalankan tugasnya sebagai DPC (eks fungsionaris) dalam satu atau beberapa periode. BSO dipilih oleh Mandataris/Formatur/Ketua Presidium dan bertanggung jawab kepadanya. Bukan kepada DPC. Kedudukan DPC dan BSO sejajar. BSO diperbolehkan untuk tidak menggunakan nama PMKRI untuk urusan keluar tetapi masih harus dalam koordinasi Ketua Presidium. BSO juga diadakan di tingkat Pengurus Pusat.

JABATAN FUNGSIONAL PMKRI

1. TIM PEMBINA/DEWAN PEMBINA
   Merupakan beberapa anggota penyatu atau senior PMKRI berpengalaman yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan SK Mandataris RUA untuk memberikan dukungan konseptual kepada PP/DPC mengenai masalah-masalah pembinaan anggota dan pengurus.
2. DEPERTIM (DEWAN PERTIMBANGAN)
   Merupakan beberapa cendekiawan Katolik Indonesia yang diangkat oleh PP/DPC yang bertugas memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada pengurus yang

bersangkutan, baik diminta atau tidak mengenai persoalan-persoalan yang dianggap penting.

3. PASTOR MODERATOR
   Adalah pastor yang ditunjuk oleh Wali Gereja dengan permohonan pengurus PMKRI yang memiliki wewenang yang menentukan dalam hal penggembalaan dan pengembangan iman, moralitas, dan spiritualitas. Artinya memiliki wewenang dalam fungsi pastoral dan magisterium (kuasa mengajar Gereja). Dalam aspek keorganisasian fungsinya sebagai penasihat.

HUBUNGAN PENGURUS PUSAT DENGAN DPC

Berdasarkan Anggaran Dasar PMKRI, Ketetapan MPA No.13/TAP/MPA-XVIII/1992, dan Ketetapan MPA No. 14/TAP/MPA-XVIII/1992, maka hubungan PP dengan cabang-cabang adalah sebagai berikut:

1. PP PMKRI berfungsi dan berwenang untuk melantik DPC PMKRI baik secara langsung atau tidak langsung melalui mandat PP PMKRI.
2. PP PMKRI berfungsi dan berwenang mengatasi permasalahan cabang sejauh tidak dapat diselesaikan di tingkat DPC dan RUA Cabang PMKRI.
3. PP PMKRI berfungsi dan berwenang memberi informasi, petunjuk, dan nasihat kepada seluruh DPC.
4. PP PMKRI berfungsi dan berwenang membantu DPC PMKRI dalam menunjang realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
5. Susunan pengurus cabang sedapat mungkin disesuaikan dengan susunan Pengurus Pusat.
6. Pengurus cabang dapat bertindak atas nama PMKRI seluruhnya, setelah mendapat ijin dari Pengurus Pusat untuk dikerjakan.

7. Pengurus cabang berkewajiban memberi laporan cabang kepada Pengurus Pusat tentang keadaan dan perkembangan cabang.
8. DPC PMKRI mempunyai fungsi dan kewajiban sebagai partisipan aktif dalam mencapai tujuan PMKRI secara nasional dengan menyelanggarakan program kerja secara aktif, efektif, dan efisien.
9. Membantu kegiatan yang bersifat nasional atau regional yang diselenggarakan PP PMKRI.
10. Membantu PP PMKRI dalam membentuk calon cabang dan atau kota jajakan calon-calon cabang PMKRI.
11. Kekayaan Pengurus Pusat salah satunya didapat dari iuran tiap-tiap cabang.
12. Kewajiban PP PMKRI sehubungan dengan iuran cabang antara lain:
    a. Membuat laporan berkala dua bulanan kepada DPC PMKRI atas penerimaan iuran cabang.
    b. Memberi bantuan dana ke cabang yang menyelenggarakan kegiatan nasional PMKRI.
    c. Mengirimkan makalah-makalah, buletin-buletin, dan informasi lain tentang situasi sosial politik kepada cabang-cabang.
13. Pengurus Pusat berhak membekukan cabang, apabila cabang dianggap melanggar asas-asas perhimpunan.

PEMBIAYAAN ORGANISASI

Anggaran Dasar PMKRI pasal 17 menyebutkan bahwa :

1. Kekayaan organisasi didapat dari:
    a. uang pangkal
    b. uang iuran
    c. sokongan-sokongan yang tidak mengikat
    d. usaha-usaha lain yang sah.
2. Kekayaan Pengurus Pusat didapat dari:

a. iuran tiap-tiap cabang
b. sokongan-sokongan yang tidak mengikat
c. usaha-usaha lain yang sah

Dalam keputusan Musket (Musyawarah Ketua-Ketua cabang) No. 08/Kep/Musket/1989 dinyatakan bahwa:

1. Besar iuran cabang minimal Rp 5.000,00/bulan, dengan dasar perhitungan jumlah anggota berkisar 20-400 orang.
2. Jumlah anggota di atas 400 orang maka besar iuran per bulan adalah Rp 5.000,00 plus Rp 500,00 untuk setiap kenaikan 100 orang anggota.
3. Pembayaran iuran cabang dilakukan secara periodik, per bulan/per duabulan/pertiga bulan melalui wesel atau langsung atas nama PP PMKRI.
4. Kewajiban PP PMKRI sehubungan dengan iuran cabang antara lain:
   a. membuat laoran berkala dua bulanan kepada DPC PMKRI atas penerimaan iuran cabang.
   b. Memberi bantuan dana ke cabang yang menyelanggrakan kegiatan nasional PMKRI seperti Musket, MPA, KSN, dan LKTM.
   c. Mengirimkan makalah-makalah, buletin-buletin, dan informasi lain tentang sistem politik nasional.

Dalam hubungan dengan kunjungan Pengurus Pusat ke cabang, sesuai keputusan Rapat kerja Nasional ke IV Pakanbaru :

- Kedatangan PP ke cabang ditanggung PP, kepulangan ditanggug DPC setempat.
- Untuk pelaksanaan kegitan nasional yang diselenggarakan di cabang berdasarkan ketetapn MPA

Margasiswa 1
Jl. Dr. Sam Ratulangie No. 1 Menteng – Jakarta Pusat – Jakarta - 10350

atau keputusan PP atau keputusan Rakernas maka pembagian alokasi dananya adalah PP 30 % dan DPC penyelenggara 70 %.

- Komisaris daerah adalah bagian dari PP sehingga dalam hal mengikuti dan atau melaksanakan kegiatan di cabang yang dalah program PP maka masuk dalam anggaran dana PP dengan alokasi PP 30 % dan Komda 70 %.

Dalam konvensi, biaya-biaya di atas nominal tersebut biasanya dinegosiasiakan antara PP dengan cabang.

DATA RAKERNAS

NETWORKING PMKRI

Selain menjalin hubungan dengan pemerintah, hirarki gereja, LSM, atau organisasi intra universiter, PMKRI telah membuat dan menjalin relasi dalam maupun luar negeri seperti berikut ini:

DALAM NEGERI

1. KELOMPOK CIPAYUNG terdiri dari PMKRI, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam IndonesiaI (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) berdiri di Cipayung tahun 1974.
2. FKPI (FORUM KEBANGSAAN PEMUDA INDONESIA) terdiri dari PMKRI, PMII, GMNI, GMKI, IPNU, IPPNU, GAMKI, GEMABUDHIS, KMHDI, PEMUDA DEMOKRAT), forum ini berdiri di Jakarta, tahun 1996 setelah terjadinya kasus 27 Juli 1996 terhadap PDI dan kerusuhan-kerusuhan yang melanda Indoensia sesudahnya.

Margasiswa 1
Jl. Dr. Sam Ratulangie No. 1 Menteng – Jakarta Pusat – Jakarta - 10350

3. KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu) – PMKRI adalah salah satu deklator berdirinya KIPP di Jakarta, tahun 1996.
4. Dalam hubungannya dengan KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia), meskipun PMKRI termasuk penandatangan Deklarasi Pemuda Indonesia tahun 1973 (deklarasi berdirinya KNPI), namun semenjak pemerintah menjadikan forum ini resmi sebagai wadah tunggal organisasi-organisasi pemuda, sebagai sentral pembinaan dan pengambangan generasi muda Indonesia pada tahun 1976, maka PMKRI sejak itu menyatakan tidak akan dan pernah bergabung di dalamnya. Karena dengan demikian telah menyalahi hakekat historis berdirinya KNPI sebagai forum komunikasi yang menjamin kemandirian dan kekritisan organisasi-organisasi di dalamnya. PMKRI tidak terikat secara struktural maupun organisatoris dengan KNPI. KNPI dengan PMKRI kedudukannya sejajar.
5. Koalisi Ornop untuk perubahan konstitusi
6. Dll.

LUAR NEGERI

1. PMKRI tergabung dalam International Movement of Chatolic Student (IMCS).
2. Menjalin hubungan pula dengan WSCF (World Student Christian Federation), IYCS (International Young Christian Student).

Margasiswa 1
Jl. Dr. Sam Ratulangie No. 1 Menteng – Jakarta Pusat – Jakarta - 10350

KESEKRETARIATAN PMKRI

1. KEPALA SURAT
   Berisi nama lengkap PP/DPC/DPCC/Kepanitiaan, alamat sekretariat, dengan warna dan logo/lambang sesuai ciri khas cabang masing-masing. Untuk PP warna kepala surat adalah biru laut dengan logo PMKRI Nasional.
2. TANGGAL
   Tempat di sebelah kanan atas dengan maksud memudahkan dokumentasi. Tempat tanggal tidak ditulis di penutup surat kanan bawah kecuali pada surat mandat dan ketetapan. Apabila surat ditulis di tempat yang sama dengan alamat kepala surat, maka tidak perlu ditulis tempat dan tanggal surat, cukup tanggal surat tersebut ditulis.
3. NOMOR SURAT
   PMKRI memiliki aturan tersendiri untuk format penulisan nomor surat. Formatnya meliputi: *nomor urut surat dibuat/lembaga penulis surat/tujuan penulisan surat-hal penulisan surat/bulan/tahun*.

   - Kode tujuan penulisan surat:

   I. INTERN ORGANISASI
   II. EKSTERN KATOLIK DALAM NEGERI
   III. EKSTERN NON-KATOLIK DALAM NEGERI
   IV. EKSTERN KATOLIK LUAR NEGERI
   V. EKSTERN NON-KATOLIK LUAR NEGERI

   - Hal penulisan surat:

   A. HAL UNDANGAN
   B. HAL PERMOHONAN
   C. PEMBERITAHUAN
   D. LAPORAN

Margasiswa 1
Jl. Dr. Sam Ratulangie No. 1 Menteng – Jakarta Pusat – Jakarta - 10350

E. UCAPAN
F. LAIN-LAIN (mandat, pernyataan sikap dll).

Kep = Keputusan
Instr = Instruksi
Kbj = Kebijaksanaan

Contoh :

1. 034/PP/I-C/2/1998
   Artinya surat dibuat dengan nomor urut 34, ditulis oleh PP PMKRI, ditujukan untuk intern organisasi (cabang) dalam hal pemberitahuan (misalnya tentang pelaksanaan Rakernas), ditulis pada bulan ke-2 (Februari), pada tahun 1998.
2. 055/PPAB/II-B/3/1998
   Artinya surat dibuat dengan nomor urut kepanitiaan nomor 55, ditulis oleh Panitia Penerimaan Anggota Baru (PPAB), ditujuan untuk ekstern katolik dalam negeri (misalnya Gereja) dalam hal permohonan (pengumuman PPAB), ditulis pada bulan ke-2, pada tahun 1998.

   Catatan:
   Untuk memudahkan pengarsipan dan dokumentasi surat maka:
   - Penomoran surat kepanitiaan harus dipisah dengan peNOMORan DPC/PP.
   - Demikan juga untuk penulisan SK DPC atau SK Mandataris, pisahkan penomoran surat, antara surat menyurat biasa dengan SK. Sehingga ada nomor urut SK tersendiri..

Margasiswa 1
Jl. Dr. Sam Ratulangie No. 1 Menteng – Jakarta Pusat – Jakarta - 10350

4. LAMPIRAN
   Diisi dengan jumlah/jenis lampiran yang diiisi dengan jumlah lembarannya. Misalnya jika lembarannya berjumalh 3 berkas maka ditulis: Lampiran: 3 berkas.
5. HAL
   Menunjukkan inti isi surat. Tidak perlu panjang lebar, cukup: Permohonan, tidak perlu Hal: Permohonan Bantuan Dana Dies Natalis. Hal sebaiknya diberi garis bawah tunggal.
6. ALAMAT TUJUAN
   Untuk organisasi, selain ditulis nama organisasinya, juga ditulis nama kota yang bersangkutan. Nama kota diberi garis bawah tunggal. Hal ini berlaku pula untuk perorangan. Nama kota dapat diganti dengan kata di tempat. Karena sifatnya lebih fleksibel untuk diserahkan dimana saja.
   Contoh:
   Kepada Yth.
   DPC PMKRI Cabang Semarang
   Sanctus Gregorius
   di
   Semarang
   Atau
   Kepada Yth.
   Bpk. Charles Simamora
   di
   tempat

7. PENGANTAR
   Sebaiknya memakai ucapan "Dengan hormat" baik untuk intern dan ekstern.
8. ISI SURAT
   Gunakan kata-kata yang singkat, jelas, padat, baku, dan sopan.

9. SALAM PENUTUP
   Gunakan semboyan nasional "PRO ECCLESIA et PATRIA!" dan kalau perlu semboyan cabang pada akhir kalimat penutup surat.
10. PENUTUP
    Gunakan nama lembaga/organisasi/kepanitiaan pada tengah surat. Untuk penandatangan surat:
    1. Surat DPC/DPC/PP
       - Dapat ditandatangani oleh Sekretaris Jendral/Wakil Sekjen (Kanan) dan Ketua Presidium (Kiri).
       - Dapat pula ditandatangani oleh Presidium yang berkaitan dengan tujuan isi surat bersama Sekretaris Jendral/Wakil Sekjen, misalnya untuk acara Dies Natalis, dapat ditandatangi oleh Presidium Pengembangan Organisasi (kiri) dan Sekretaris Jendral (kanan).
       - Atau Presidium (kanan) beserta bironya. Biro di sini berfungsi sebagai sekretaris presidium yang bersangkutan.

       Catatan:
       a. Hindari penggunaan tanda tangan atas nama (a.n) kalau situasi tidak benar-benar mendesak.
       b. Prinsipnya surat keluar PMKRI baru dianggap sah bila ditandatangani minimal dua orang sesuai dengan fungsi dan jabatannya, kecuali seperti untuk SK Mandataris RUA/MPA.
    2. Surat Kepanitiaan
       - Untuk surat menyurat kepanitiaan apapun, sebaiknya ditandatangani oleh sekretaris dan ketua panitia, beserta Ketua Presidium. Apabila memiliki Pastor Moderator sebaiknya gunakan pula tanda tangan beliau. Hal ini lebih berkaitan pada soal kepecayaan ektern PMKRI terhadap

Margasiswa 1
Jl. Dr. Sam Ratulangie No. 1 Menteng – Jakarta Pusat – Jakarta - 10350

kegiatan PMKRI, khususnya yang menyangkut persoalan pendanaan.

- Khusus untuk surat menyurat pelantikan.
  Selain ditandatangani oleh sekretaris dan ketua panitia. Harus ditandatangani pula oleh Ketua Presidium Demisioner dan Ketua Presidium Baru. Dalam menyampaikan surat permohonan pelantikan kepada PP wajib dilampirkan:
  1. Ketetapan RUA tentang Pengangkatan Mandataris RUA terbaru.
  2. ART terbaru dari cabang.

10. TEMBUSAN

Berisi orang/lembaga yang dikirimi surat yang sama, selain pada alamat tujuan surat itu dibuat. Jangan menulis nama yang sama dengan nama alamat tujuan surat itu dibuat pada bagian tembusan. Misalnya surat pemberitahuan susunan DPC kepada PP PMKRI. Maka pada tembusan jangan kembali menuliskan PP PMKRI tetapi tuliskan lembaga lain pada tembusan itu. Kemudian lingkari atau distabilo pada orang/lembaga yang menjadi tujuan pengiriman surat misalnya lingkari pada Kakansosopol.

Margasiswa 1
Jl. Dr. Sam Ratulangie No. 1 Menteng – Jakarta Pusat – Jakarta - 10350

CONTOH SURAT 1

Jakarta, 11 Juni 1998

No. : 045/DPC/I-A/06/1998
Lamp. : -
Hal : Undangan

Kepada Yth.
……
Di
tempat

Dengan hormat,

Dewan Pimpinan Cabang PMKRI Cabang Pematngsiantar Santo Fransiskus dari Assisi mengundang Saudara untuk menghadiri Rapat Umum Anggota Cabang yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal	: Minggu/26 Juni 1998
Pukul	: 16.00 – selesai
Tempat	: Jl. Lingga No. 1 Pematangsiantar
Agenda	: 1. Laporan Tim Verifikasi
	2. Laporan MPAB Cabang

Demikianlah undangan dari kami, atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

Pro Ecclesia et Patria!

Hormat kami,
DEWAN PIMPINAN CABANG
PERHIMPUNAN MAHASISWA KATOLIK REPUBLIK INDONESIA
CABANG PEMATANGSIANTAR SANTO FRANSISKUS DARI ASSISI

Tomson Sabngan Silalahi	**Esron Huauruk**
Ketua Presidium	**Sekretaris Jenderal**

NB: Pakaian bebas rapi dan atribut lengkap.
Catatan :
untuk nomor surat dll, jika disingkat maka semua disingkat atau sebaliknya
Contoh : No. :
Lamp. :
Hal :

CONTOH SURAT 2

SURAT MANDAT
052/DPC/I-F/06/1998

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Dewan Pimpinan Cabang PMKRI Cabang Semarang Sanctus Gregorius, dengan ini memberikan kepercayaan penuh kepada:
1. *Irvinto Dobi Ariasto (Biro Andrawina)*
2. *Aloysia Wiwin Purwandari (Biro Hubungan Antar Perguruan Tinggi)*
3. *Paula Eka Yani (Biro Kesekretariatan)*

Untuk mengikuti **Training for Trainer Fasilitator Komda II pada tanggal 10-14 Juni 1998 di Salatiga**. Dengan kewajiban sebagai berikut:
a. Menjaga nama baik cabang.
b. Mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh.
c. Melaporkan segala kegiatan yang telah dilakukan paling lambat satu bulan setelah kegiatan berakhir.

Demikianlah surat mandat ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Pro Ecclesia et Patria !!!

Diberikan di: Semarang
Pada tanggal: 3 Juni 1998

DEWAN PIMPINAN CABANG
PERHIMPUNAN MAHASISWA KATOLIK REPUBLIK INDONESIA
CABANG SEMARANG SANCTUS GREGORIUS

Natalia S.	Herybertus P.
Ketua Presidium	**Sekretaris Jenderal**

Tembusan:
- Yang bersangkutan

Margasiswa 1
Jl. Dr. Sam Ratulangie No. 1 Menteng – Jakarta Pusat – Jakarta - 10350

CONTOH SURAT 3

SURAT MANDAT
012/DPC/I-F/06/1994

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Dewan Pimpinan Cabang PMKRI Cabang Surakarta Sanctus Paulus, dengan ini memberikan kepercayaan penuh kepada:

MR. DYAH SAVITRI
Ketua Biro Kerohanian

Untuk menjabat sebagai Ketua Pelaksana Diskusi Panel Seksualitas Remaja Katolik. Dengan kewajiban sebagai berikut:

1. Memimpin Panitia Pelaksana Diskusi Panel Seksualitas Remaja Katolik.
2. Melaksanakan Diskusi Panel Seksualitas Remaja Katolik agar mencapai tujuan yang dikehendaki bersama.
3. Melaporkan segala kegiatan yang telah dilaksanakan paling lambat satu bulan sejak kegiatan berakhir.

Demikianlah surat mandat ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Diberikan di: Surakarta
Pada tanggal: 3 Juni 1994

DEWAN PIMPINAN CABANG
PERHIMPUNAN MAHASISWA KATOLIK REPUBLIK INDONESIA
CABANG SURAKARTA SANCTUS PAULUS

Lidya Natalia S.	Franz Wely
Ketua Presidium	**Sekretaris Jenderal**

Margasiswa 1
Jl. Dr. Sam Ratulangie No. 1 Menteng – Jakarta Pusat – Jakarta - 10350

SIDANG PMKRI

Sidang dalam PMKRI pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu Sidang DPC dengan Sidang RUAC.

a. Sidang DPC
   Sidang ini dipimpin oleh Ketua Presidium (DPC/PP) bersama dengan presidium yang lain, secara kolektif dan kolegial. Kegiatan-kegiatan yang menggunakan sidang DPC adalah: Sidang Kehormatan Pembukaan MPAB, Sidang kehormatan dengan materi khusus pelantikan Mandataris RUAC/Formatur Tunggal/Ketua Presidium dsb. Untuk sidang DPC yang dihadiri oleh Alumni, Pemerintah, atau orang di luar PMKRI sering disebut juga Sidang DPC yang diperluas.
b. Sidang RUAC
   Sidang RUAC adalah sidang dalam rangka Rapat Umum Anggota Cabang. Pada awalnya, sidang ini dipimpin oleh Ketua Presidium bersama presidium lainnya secara kolektif dan kolegial sampai terbentuknya panitia Ad Hoc (sementara) yang memimpin sidang RUAC. Sidang ini diikuti oleh anggota biasa PMKRI, penyatu, penyokong, depertim, dan pastor moderator. Sidang ini bersifat intern organisasi.

Untuk sidang PP pada dasarnya sama dengan sidang DPC, demikian pula dengan sidang MPA yang pada dasarnya sama dengan sidang RUAC. Perbedaannya hanya masalah skop/jangkauannya yang lebih luas (tingkat nasional).

Perlengkapan Sidang

1. Bendera Merah Putih
2. Bendera PMKRI (Pusat dan Cabang)
3. Gordon (PHC dan atau kepanitiaan)
4. Palu Sidang

5. Tata protokoler
6. Dirigen
7. MC (Pembawa acara)
8. Dirigen
9. Pembaca doa

Dalam sidang, sejenis RUAC atau MPA, dalam pembahasan tata tertib atau materi sidang yang lain biasanya diwarnai dengan berbagai macam interupsi. **Interupsi** adalah *menyela* orang yang sedang berbicara atau sedang mengemukakan persoalan. Tidak semua interupsi harus dilayani oleh pemimpin rapat.

Ada empat jenis interupsi:
1. INTERUPSI *POINT OF ORDER*; interupsi untuk mengemukakan sesuatu, atau menyatakan hal yang baru.
2. INTERUPSI *POINT OF CLEARENCE*; interupsi untuk memperjelas maksud pembicaraan yang dianggap menyimpang dari maksud tujuan semula.
3. INTERUPSI *POINT OF INFORMATION*; interupsi untuk meminta penjelasan mengenai sesuatu.
4. INTERUPSI *POINT OF PREVILEGE*; interupsi untuk menghentikan pembicaraan karena pembicaraan telah dianggap menyangkut nama baik pribadi seseorang dalam sidang.

PEDOMAN PENULISAN KETETAPAN RUAC
Pada dasarnya pedoman penulisan tersebut sama dengan yang tertera dalam ketetapan-ketetapan MPA, formatnya juga dapat berlaku untuk Surat Keputusan (SK) DPC/PP/Mandataris RUAC, perbedaannya hanyalah masalah ruang lingkup nasional dan cabang. Serta lembaga yang mengeluarkan. Formatnya adalah sebagai berikut:

KETETAPAN
RAPAT UMUM ANGGOTA CABANG
PERHIMPUNAN MAHASISWA KATOLIK REPUBLIK INDONESIA
CABANG …….. SANCTUS ……..

Nomor: 01/TAP/RUAC-cabang/TAHUN

Tentang
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

---

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa,
Sidang Rapat Umum Anggota Cabang (RUAC) Perhimpunan Mahasiswa Katolik Indonesia Cabang …… Sanctus ……. setelah:

Menimbang : *Ladasan filosifis (latar belakang mengapa ketetapan ini diperlukan)*
Mengingat : *Landasan yuridis (dasar hukum AD,ART,ARTC,TAP MPA,KEP PP)*
Memerhatikan : Landasan sosiologis (saran dan usul anggota)

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pasal 1 : ……
Pasal 2 : ……
Pasal n-1 : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan dalam ketetapan ini, maka ketetapan ini dapat ditinjau kembali.
Psal n : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di: ……..
Pada tanggal: ……..

RAPAT UMUM ANGGOTA CABANG
PERHIMPUNAN MAHASISWA KATOLIK REPUBLIK INDONESIA
CABANG …… SANCTUS ……

Nama lengkap	Nama lengkap	Nama lengkap
Ketua Sidang	Sekretaris Sidang	Anggota

Margasiswa 1
Jl. Dr. Sam Ratulangie No. 1 Menteng – Jakarta Pusat – Jakarta - 10350

CATATAN:

1. Apabila ketetapan ini disahkan maka harus ditandatangani oleh para pimpinan sidang (Ketua, Sekretaris, dan Anggota).
2. Apabila hendak didokumentasikan (dalam bentuk buku) maka tanda tangan dapat diganti dengan tulisan tertanda (ttd) di atas nama lengkap.
3. Apabila ketetapan memerlukan lampiran, maka dalam pojok kiri atas lembar kertas harus ditulis: lampiran TAP RUAC No. 01/TAP/RUAC- cabang/TAHUN.
4. Ada juga kesepakatan rapat yang hanya deberi judul keputusan saja (artinya hanya mengikat kepada yg terlibat saat ini dan berlakunya hanya saat itu) Pertanggungjwabannya hanya kepada pemberi keputusan. Contoh: Tatib, agenda MPA/RUAC itu biasanya hanya disebut sebagai keputusan MPA/RUAC saja.
5. Dalam pembuatan Surat ketetapan baik itu MPA/RUA atau surat keputusan PP/DPC dan atau jabatan sturkutral lainya dalam lembaga kekuasaan eksekutif PMKRI semua ketentuan mulai dari AD/ART/ARTC/Tap MPA/TAP RUA yang berhubungan dengan hal maksud dikeluarkannya surat keputusan dan atau ketetapan tersebut harus dicantumkan dengan disertai nomor dan bunyi pasal dimaksud. Ini dimaksudkan demi memperjelas dasar hukum dikeluarkan keputusan tersebut dan telah dipastikannya bahwa tidak ada ketentuan yuridis organsasi yang dilanggar.

SISTEM PEMBINAAN PMKRI

I. TUJUAN: pemenuhan visi dan misi PMKRI.

II. PARADIGMA:

Bahwa pembinaan di PMKRI merupakan:

1. Upaya pemenuhan visi PMKRI.
2. Bagian dari proses perjuangan PMKRI untuk pemberdayaan anggota dan pembentukan nilai-nilai spiritualitas perjuangan kemasyarakatan sesuai dengan visi PMKRI.
3. Sistem yang terpadu yang bekerja secara sinergis dan satu kesatuan antara pembinaan formal, informal, dan nonformal.
4. Upaya pembebasan peserta bina untuk bersikap berani membela kebenaran dan memilih yang terbaik untuk hidupnya.

III. ORIENTASI KADER HASIL PEMBINAAN

Sistem pembinaan di PMKRI disusun dan dilaksanakan untuk membantu para anggota PMKRI menjadi kader calon pemimpin yang tangguh yang memiliki keunggulan pribadi karena integritas pribadi yang utuh dan kecakapan yang tinggi.

Sebagai anggota PMKRI, integritas pribadi yang utuh adalah pribadi yang memiliki Sensus Christi, dengan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Sensus Chatolicus (Rasa kekatolikan)
2. Sensus Hominis (Rasa Kemanusiaan)
3. Universalitas
4. Semangat Man for Others (Semangat melayani sesama)
5. Pribadi yang menjadi teladan
6. Magis Semper (semangat lebih)

Margasiswa 1
Jl. Dr. Sam Ratulangie No. 1 Menteng – Jakarta Pusat – Jakarta - 10350

Pembinaan di PMKRI melibatkan aspek kognitif (Pengetahuan), afektif (Perasaan) dan Psikomotorik (aksi), seperti ketrampilan berkomunikasi dengan orang lain, negosiasi, debat, pendampingan masyarakat kecil, dan sebagainya.

IV. STRATEGI DASAR PEMBINAAN

1. *Mengutamakan metode proses*,
   Pembinaan berlangsung secara kontinu, berkelanjutan, dan terus menerus sejak awal keanggotaan PMKRI sampai saat menjadi anggota penyatu.
2. *Terbuka*
   PMKRI memandang bahwa proses pembinaan kader tidak mungkin hanya berlangsung di tubuh PMKRI saja. Sehingga peran lingkungan dan proses belajar individu sangat mempengaruhi kualitas sistem pembinaan pula. Maka keterlibatan kader di lingkungan pembinaan lain akan dibuka secara lebar oleh PMKRI, guna semakin meningkatkan human skill kader maupun untuk memberikan input bagi evaluasi dan inovasi sistem pembinaan PMKRI sendiri.
3. *Pendidikan orang dewasa*
   Model pendidikan orang dewasa adalah model pendidikan yang memandang bahwa antara peserta didik dan pendidik adalah orang yang mempunyai kesejajaran untuk bersama-sama belajar. Tidak ada yang lebih pintar, kecuali mengetahui sebuah persoalan terlebih dahulu daripada yang lain. Peserta didik belajar bagaimana memahami ilmu atau skill yang ditansferkan oleh pendidik. Sedangkan pendidik harus belajar secara terus menerus bagaimana ilmu

atau skill yang diperolehnya agar dapat dipahami dengan baik dan bagaimana harus memperlakukan perserta didik secara manusiawi dan kreatif. Sehingga kultur yang ditumbuhkan dalam pendekatan ini adalah iklim belajar yang dialogis (dua arah) bukan pedagogis (satu arah).

4. *Swabina*
   Swabina adalah strategi pembinaan yang mengandalkan kekuatan PMKRI sendiri, sehingga PMKRI mampu membina diri secara mandiri. Artinya PMKRI harus mampu menciptakan pelatih, pembina, fasilitator, dan narasumber yang handal untuk melaksanakan proses pembinaan yang mandiri. Sehingga kekhasan, makna, dan tujuan pembinaan PMKRI tidak bias.
5. *Evaluasi sistem secara berkala*
   Sistem harus diuji secara berkala sehingga tetap aktual dan kontekstual, dibatasi masa berlakunya dan dikaji secara berkala dalam kurun waktu tertentu.

V. JENIS-JENIS PEMBINAAN

PMKRI memiliki tiga jenis pembinaan, yaitu pembinaan formal, informal, dan nonformal. Ketiganya memiliki kesejajaran, sifat saling melengkapi dan harus diprogram menjadi satu kesatuan yang sinergis.

a. Pembinaan Formal Berjenjang:
   I. MPAB (Masa Penerimaan Anggota Baru)
   II. MABIM (Masa Bimbingan)
   III. LKK (Latihan Kepemimpinan Kader)
   IV. KSR (Konfrensi Studi Regional) diselenggarkan di tingkat regio oleh KOMDA
   V. KSN (Konfrensi Studi Nasional)

VI. diselngegarakan oleh Pengurus Pusat

b. Pembinaan Informal, merupakan pembinaan keseharian kader-kader PMKRI di perhimpunan, misalnya keterlibatan dalam aktivitas-aktivitas PMKRI, pendampingan kader, pendampingan anak jalanan, diskusi, dsb.
c. Pembinaan non-formal, pembinaan untuk meningkatkan profesionalitas anggota berdasarkan minat atau bakat anggota.
   Misalnya: *Training for Trainer*, Pelatihan Internet, Pelatihan Jurnalistik, Pelatihan Analisa Sosial, dsb.

TATA PROTOKOLER

Menurut Keputusan Pengurus Pusat PMKRI **No. 367/PP/Kep/02/1996** tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Protokoler PMKRI maka alur tata protokoler yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut:

I. SIDANG KEHORMATAN DALAM RANGKA PEMBUKAAN SIDANG MPA KE - ……. DAN KONGRES KE - ……. PMKRI

01. Hadirin dimohon berdiri.
02. Ketua Panitia Pelaksana dan Pengurus Pusat PMKRI Sanctus Thomas Aquinas memasuki ruangan.
03. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
04. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI.
05. Menyanyikan Hymne PMKRI "Bhanyangkara Gereja dan Nusa".
06. Hadirin dipersilakan berdiri.
07. Pembukaan sidang kehormatan dalam rangka pembukaan Sidang MPA ke - …… dan

Margasiswa 1
Jl. Dr. Sam Ratulangie No. 1 Menteng – Jakarta Pusat – Jakarta - 10350

Kongres ke - ……. PMKRI oleh Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI.

08. Laporan Ketua Panitia.
09. Kata sambutan oleh Ketua Presidium Pengurus Pusat.
10. Kata sambutan oleh wakil anggota penyatu/depertim.
11. Kata sambutan oleh hirarki Gereja/Pastor Moderator.
12. Kata sambutan oleh "wakil pemerintah" dilanjutkan dengan pembukaan secara resmi pembukaan sidang MPA ke - …… dan Kongres ke - ….. PMKRI.
13. Pembacaan doa.
14. Penutupan sidang kehormatan dalam rangka pembukaan sidang MPA ke - ……. Dan Kongres ke - ……. PMKRI oleh Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI.
15. Hadirin dimohon berdiri.
16. Ketua Panitia Pelaksana dan Pengurus Pusat PMKRI meninggalkan ruangan.
17. Hadirin dipersilakan duduk kembali.

II. **SIDANG KEHORMATAN DALAM RANGKA PENUTUPAN SIDANG MPA KE - ……. DAN KONGRES KE - ……. PMKRI**.

01. Hadirin dimohon berdiri.
02. Ketua panitia pelaksana, panitia ad-hoc, dan Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI Sanctus Thomas Aquinas Demisioner memasuki ruangan.
03. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
04. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI Demisioner.

Margasiswa 1
Jl. Dr. Sam Ratulangie No. 1 Menteng – Jakarta Pusat – Jakarta - 10350

05. Menyanyikan Hymne PMKRI "Bhayangkara Gereja dan Nusa".
06. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
07. Pembukaan sidang kehormatan dalam rangka penutupan sidang MPA ke - …… dan Kongres ke - …….. PMKRI Sanctus Thomas Aquinas oleh Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI Demisioner.
08. Pembacaan hasil-hasil ketetapan MPA oleh sekretaris Panitia Ad-Hoc.
09. Penyerahan hasil-hasil ketetapan MPA dan palu sidang kepada Mandataris MPA/Formatur Tunggal/Ketua Presidium terpilih.
10. Laporan Ketua Panitia.
11. Kata sambutan oleh Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI demisioner
12. Kata sambutan oleh Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI terpilih.
13. Kata sambutan oleh wakil anggota penyatu/depertim.
14. Kata sambutan oleh Hirarki Gereja/Pastor Moderator.
15. Kata sambutan oleh "wakil pemerintah" dilanjutkan dengan penutupan secara resmi penutupan MPA ke - …… dan Kongres ke - ….. PMKRI.
16. Pembacaan doa.
17. Penutupan sidang kehormatan dalam rangka penutupan sidang MPA ke - …… dan Kongres ke- …….. PMKRI oleh Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI Sanctus Thomas Aquinas.
18. Hadirin dimohon berdiri.
19. Ketua panitia pelaksana dan Pengurus Pusat PMKRI meninggalkan ruangan.

Margasiswa 1
Jl. Dr. Sam Ratulangie No. 1 Menteng – Jakarta Pusat – Jakarta - 10350

20. Hadirin dipersilakan duduk kembali.

NB :

1. Untuk sidang Rapat Umum Anggota Cabang; Sidang MPA ke - ……. Dan Kongres ke - ……. PMKRI diganti Rapat Umum Anggota PMKRI Cabang ……
2. Pengurus Pusat diganti Dewan Pimpinan Cabang

III. **SIDANG KEHORMATAN DALAM RANGKA PEMBUKAAN KONFERENSI STUDI NASIONAL PMKRI**.

01. Hadirin dimohon berdiri.
02. Ketua panitia pelaksana dan Pengurus Pusat PMKRI Sanctus Thomas Aquinas memasuki ruangan.
03. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
04. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua Presidium Pengurus Pusat PP PMKRI Sanctus Thomas Aquinas.
05. Menyanyikan Hymne PMKRI "Bhayangkara Gereja dan Nusa".
06. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
07. Pembukaan sidang kehormatan dalam rangka pembukaan Konferensi Studi Nasional PMKRI Sanctus Thomas Aquinas.
08. Laporan Ketua Panitia.
09. Kata sambutan oleh Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI Sanctus Thomas Aquinas.
10. Kata sambutan oleh wakil anggota penyatu/depertim.
11. Kata sambutan oleh Hirarki Gereja/Pastor Moderator.

Margasiswa 1
Jl. Dr. Sam Ratulangie No. 1 Menteng – Jakarta Pusat – Jakarta - 10350

12. Kata sambutan oleh "wakil pemerintah" dilanjutkan dengan pembukaan secara resmi pembukaan Konferensi Studi Nasional PMKRI Sanctus Thomas Aquinas tahun ……
13. Pembacaan doa.
14. Penutupan sidang kehormatan dalam rangka penutupan Konferensi Studi Nasional PMKRI Sanctus Thomas Aquinas tahun …….. oleh Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI Sanctus Thomas Aquinas.
15. Hadirin dimohon berdiri.
16. Ketua panitia pelaksana dan Pengurus Pusat PMKRI meninggalkan ruangan.
17. Hadirin dipersilakan duduk kembali.

NB :

1. Untuk penutupan; "Pembukaan" diganti "Penutupan".
2. Protokoler ini juga digunakan untuk pembukaan/penutupan MPAB/MABIM/LKK/KSR/Pendidikan.
3. Untuk penutupan, sebelum laporan ketua panitia pelaksana dibacakan surat keputusan Pengurus Pusat/Dewan Pimpinan Cabang PMKRI Sanctus …….. tentang kelulusan KSN/MPAB/MABIM/LKK/KSR/Pendidikan.
4. Untuk KSR Ketua Presidium diganti Komisaris Daerah Wilayah …… PP PMKRI.
5. Untuk MPAB/MABIM setelah kata sambutan Ketua Presidium DPC dilanjutkan kata sambutan oleh Pastor Moderator.
6. Untuk LKK setelah kata sambutan Ketua Presidium DPC dilanjutkan kata sambutan oleh PP PMKRI.

Margasiswa 1
Jl. Dr. Sam Ratulangie No. 1 Menteng – Jakarta Pusat – Jakarta - 10350

7. Untuk KSR setelah kata sambutan Komisaris Daerah dilanjutkan kata sambutan oleh PP PMKRI.
8. Untuk NOMOR 02.; *MPAB/MABIM* - yang memasuki ruangan selain Ketua Panitia Pelaksana adalah Presidium Harian Cabang - DPC PMKRI. Sedangkan *LKK* selain Ketua Panitia, dan PHC adalah Pengurus Pusat PMKRI. Khusus *KSR*, disamping Ketua Panitia adalah para Ketua Presidium Cabang/PHC di komisariat yang bersangkutan, dengan Komisaris Daerah dan PP PMKRI.

IV. **SIDANG KEHORMATAN DALAM RANGKA PELANTIKAN PENGURUS PUSAT PMKRI SANCTUS THOMAS AQUINAS PERIODE ……..**

01. Hadirin dimohon berdiri.
02. Ketua panitia pelaksana dan Pengurus Pusat PMKRI Sanctus Thomas Aquinas memasuki ruangan.
03. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
04. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI Demisioner.
05. Menyanyikan Hymne PMKRI "Bhayangkara Gereja dan Nusa".
06. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
07. Pembukaan sidang kehormatan dalam rangka pelantikan Pengurus Pusat PMKRI Sanctus Thomas Aquinas oleh Ketua Presidium Demisioner.
08. Pembacaan Ketetapan Sidang MPA ke-…… NOMOR ……. Tentang Pengangkatan Mandataris MPA/Formatur

Tunggal/Ketua Presidium oleh sekretaris panitia Ad Hoc.

09. Penyerahan surat ketetapan sidang MPA ke …… NOMOR …… kepada Mgr …… (yang akan melantik Ketua Presidium).
10. Penyerahan Gordon Staf PP PMKRI kepada Ketua Presidium PP PMKRI.
11. Penyerahan Gordon Ketua Presidium PP PMKRI kepada Mgr …….
12. Pelantikan Ketua Presidium PP PMKRI periode ……. Oleh Mgr. …….
13. Penandatanganan naskah serah terima jabatan oleh Ketua Presidium PP PMKRI periode ……. Dan ketua Presidium PP PMKRI periode ……. Disaksikan oleh Mgr……..
14. Pembacaan Keputusan Mandataris MPA/Formatur Tunggal/Ketua Presidium PP PMKRI.
15. Pelantikan staf PP PMKRI oleh Mandataris MPA/Formatur Tunggal/Ketua Presidium.
16. Laporan Ketua Panitia.
17. Kata sambutan oleh Ketua Presidium Pengurus Pusat periode ……(demisioner).
18. Kata sambutan oleh Ketua Pengurus Pusat periode ……
19. Kata sambutan oleh wakil anggota penyatu.
20. Kata sambutan oleh Hirarki Gereja/Pastor Moderator.
21. Kata sambutan oleh "wakil pemerintah"
22. Kata sambutan oleh Mgr. ……..
23. Pembacaan doa.

Margasiswa 1
Jl. Dr. Sam Ratulangie No. 1 Menteng – Jakarta Pusat – Jakarta - 10350

24. Penutupan sidang kehormatan dalam rangka Pelantikan Pengurus Pusat PMKRI oleh Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI.
25. Hadirin dimohon berdiri.
26. Ketua panitia pelaksana dan Pengurus Pusat PMKRI meninggalkan ruangan.
27. Hadirin dipersilakan duduk kembali.

NB :

1. Untuk pelantikan DPC PMKRI; Pengurus Pusat diganti "DPC PMKRI Cabang …… " "Mgr" diganti PP PMKRI, Ketetapan Sidang MPA diganti Ketetapan RUA Cabang.

KONGRES DAN SIDANG MPA PMKRI

WAKTU	TEMPAT	KONGRES	MPA	KETUA
9-11 Jun 1951	Yogyakarta	I	-	PK.Hardjasudirdja
26-31 Des 1952	Surabaya	II	-	FX. Sudiono
26-31 Des 1953	Jakarta	III	-	Anton Moeliono
25-31 Des 1954	Bandung	IV	-	Wisanto Haryadi
26-31 Des 1955	Yogyakarta	V	-	C.Koentoro
27-31 Des 1956	Surabaya	VI	-	FX.Surjanto
22-31 Des 1957	Jakarta	VII	-	BS. Muljana
26-28 Des 1958	Bandung	-	I	BS.Muljana
26-31 Des 1959	Semarang	VIII	II	A.Hadyana P
26-30 Des 1960	Malang	-	III	A.Ben Mboi
26-31 Des 1961	Yogyakarta	IX	IV	Harry Tjan Silalahi
27-31 Des 1962	Surabaya	-	V	Harimurti K
27-31 Des 1963	Jakarta	-	VI	Cosmas Batubara
27-31 Des 1964	Malang	X	VII	Cosmas Batubara
1-6 Apr 1967	Bandung	-	VIII	Savrinus Suardi
6-13 Apr 1969	Surabaya	XI	IX	J Max Wayong
21-27 Agt 1971	Surakarta	XII	X	Chris Siner Key Timu
8-13 Okt 1975	Semarang	XIII	XI	Chris Siner Key Timu
10-19 Des 1977	Malang	XIV	XII	Wem Kaunang

Margasiswa 1
Jl. Dr. Sam Ratulangie No. 1 Menteng – Jakarta Pusat – Jakarta - 10350

1-8 Mar 1981	Jakarta	-	XIII	Marcus Mali
8-17 Mar 1985	Jakarta	XV	XIV	Paulus Januar
1-9 Mei 1988	Surabaya	XVI	XV	Gaudens Wodar
26 Agt-3 Sep 1990	U. Pandang	XVII	XVI	Cyrillus I Kerong
24-29 Nov 1992	Bandung	XVIII	XVII	Leonardo Renyut
19-27 Nov 1994	Medan	XIX	XVIII	Antonius Doni
1996	Malang	XX	XIX	I Riza Primahendra
Oktober 1998	Banjarmasin	XXI	XX	Ign. Kikin P Tarigan S
Desember 2000	Jakarta	XXII	XXI	Robert JE. Nalenan
November 2002	Kupang	XXIII	XXII	Maria Restu Hapsari
November 2004	Manado	XXIV	XXIII	Immanuel J. Tular
November 2006	Jayapura	XXV	XXIV	Bartolomeus Jematu
Desember 2009	Denpasar	XXVI	XXV	Stefanus Asat Gusma
Nopember 2011	Pontianak	XXVII	XXVI	Parlindungan Simarmata
Nopember 2013	Surabaya	XXVIII	XXVII	Lidya Natalia Sartono
Januari 2016	Cibubur	XXIX	XXVIII	Angelo Wake Kako
22 -28 Januari 2018	Palembang	XXX	XXIX	Juventus Prima Yoris Kago

Margasiswa 1
Jl. Dr. Sam Ratulangie No. 1 Menteng – Jakarta Pusat – Jakarta - 10350